

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bersamaan dengan berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia, sehingga bukti tanggung jawab pada masyarakat terhadap kemampuan pemerintah menggambarkan pernyataan umum. Adanya pernyataan dari masyarakat inilah yang membuat pemerintah harus transparan dan akuntabel dalam menjalankan pengelolaan Negara. Solusi dalam melaksanakan akuntabilitas serta transparansi pengaturan keuangan pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun daerah yaitu saat mengungkapkan laporan keuangan.

Laporan keuangan dibuat agar dapat memberikan suatu informasi yang relevan tentang semua transaksi serta posisi keuangan dijalankan kepada entitas pelapor pada masa pelaporan. Laporan keuangan dapat menjadi sebuah acuan untuk mengambil sebuah keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Sundari dan Rahayu, 2019). Kejadian dasar bagi menyusun laporan keuangan yaitu kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada instansi pemerintah daerah dimana rendahnya mutu laporan keuangan yang didapatkan belum terpenuhinya petunjuk pelaporan keuangan normatif sesuai yang disyaratkan SAP. Laporan keuangan dapat berkualitas tinggi apabila laporan keuangan saat ditampilkan oleh entitas pelapor memenuhi empat ciri-ciri, yaitu relevansi, keandalan, komparabilitas, serta bisa dimengerti (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Sistem pengendalian internal yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang baik juga. Sistem pengendalian internal yang efektif dirancang untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efisiensi operasional. Dengan pengendalian yang baik, risiko kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat diminimalkan. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang baik akan tercermin dalam beberapa hal diantaranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem otorisasi, adanya pemisahan tugas, dan adanya sistem

formulir, dokumen dan catatan, yang mana semua hal tersebut akan mendukung fungsi keuangan yang andal dan semakin baik pengendalian internal yang diterapkan maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang menghasilkan karena kesalahan akuntansi lebih cepat terdeteksi, proses pelaporan lebih terstruktur, akuntabilitas dan transparansi meningkat (Agung dan Gayatri, 2018).

Untuk penyusunan laporan keuangan dibutuhkan pemanfaatan teknologi yang baik, karena pada memanfaatkan teknologi informasi dapat memperkecil peluang terjadinya kecurangan. Teknologi informasi yang diimplementasikan dengan baik dapat membantu perusahaan mengotomatisasi, menyederhanakan, dan meningkatkan akurasi proses pelaporan keuangan. Teknologi membantu meningkatkan keakuratan, keandalan, kecepatan, dan keamanan dalam proses pelaporan keuangan. Namun, manfaat ini hanya dapat dicapai jika teknologi diterapkan dengan tepat, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, dan dilindungi dari risiko keamanan (Paramitha dan Dharmadiaksa, 2019).

Laporan keuangan yang baik membutuhkan kompetensi sumber daya manusia, karena apabila kompetensi pembentuk laporan keuangan baik maka dimungkinkan hasil kinerja yang dihasilkan juga baik. Potensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi terhadap baik buruknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sumber daya yang dimaksudkan adalah yang mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar dan yang memahami jalannya akuntansi pemerintah, baik dalam hal keuangan maupun operasional (Indrayani dan Widiastuti, 2020).

Dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup tetapi tidak dibantu dengan teknologi informasi belum bisa menghasilkan sebuah laporan keuangan yang akurat. untuk ini pemanfaatan teknologi dapat sangat dibutuhkan saat sebuah proses pengelolaan data transaksi hingga laporan keuangan yang dihasilkan terbebas dari suatu salah material yang disebabkan oleh *human error*. Kepatuhan pemanfaatan teknologi informasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Dengan adanya kendala-kendala yang menyebabkan ketidak optimalan pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh kepada ketepatanwaktuan serta keandalan suatu laporan keuangan. Kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informasi yang memadai tidak bisa menghasilkan suatu laporan keuangan dengan andal. Pihak BPK menemukan masalah-masalah tentang laporan keuangan yaitu, ketidakpatuhan, ketidakefisienan, ketidaktepatan, ketidakefektifan serta penemuan penyimpangan administrasi serta kekurangan sistem pengendalian intern belum menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah dalam mencakup karakteristik/nilai informasi yang ditetapkan, ialah andal.

Isu mengenai sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) menjadi topik yang memiliki pengaruh cukup besar akhir-akhir ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal selalu menilai “kekuatan” Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada pengujian dimana digunakannya guna menetapkan luas lingkup (*scope*) penelitian pada saat melaksanakannya. Sebagian lembaga pemantau (*watch*) ialah mengomentari kekurangan sistem pengendalian internal saat ditentukan oleh pemerintahan, hal itu menjadi kesempatan sangat besar untuk terlaksananya kesalahan pada penerapan anggaran (APBN/APBD).

Dalam memperoleh pengaturan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel, pimpinan/menteri lembaga negara, gubernur, hingga bupati/walikota dituntut melaksanakan penanganan saat diselenggarakannya aktivitas pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki tujuan rencana kerjanya sudah termaktub dalam sebuah rencana kerja untuk jangka waktu yang sudah ditentukan yang selanjutnya membuat Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja tersebut. Fungsi dari pengendalian digunakan oleh Kepala Daerah pada suatu Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian internal adalah suatu cara dimana dibuat agar membagikan kepercayaan tentang perolehan tujuan Pemerintah Daerah dimana tercermin pada keakuratan laporan keuangan, efisien, serta efektif saat dilaksanakannya kegiatan dan program dan patuh pada peraturan perundang-undangan (PP 58 Tahun 2005).

Dalam tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi publik serta segala kegiatan birokrasi hingga pada tingkat pemberitahuan adalah suatu bukti pertanggungjawaban negara dengan publik. Bukti tanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan termuat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

laporan keuangan adalah satu dari beberapa bentuk akuntabilitas. laporan keuangan pemerintah adalah hal penting untuk terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan pada publik. Atas permintaan publik dengan pelaksanaan akuntabilitas publik semakin besar maka dapat menyebabkan implikasi terhadap manajemen pada instansi pemerintah dalam membagikan informasi pada masyarakat. Fungsi dari informasi pada laporan keuangan belum mempunyai guna apabila penyampaian serta penyajian informasi keuangan tercatat tidak tepat waktu dan tidak andal.

Peristiwa yang terjadi dengan berkembangnya sektor publik di Indonesia akhir-akhir ini yaitu meningkatnya permintaan akuntabilitas pada lembaga-lembaga publik, untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akuntabilitas bisa didefinisikan berupa pertanggungjawaban atas kesuksesan maupun kegagalan penerapan untuk memenuhi tujuan maupun sasaran yang ditentukan (Sukma et al., 2023).

Sekarang ini laporan keuangan pemerintah masih terdapat banyak penyimpangan dan juga belum menyajikan data laporan keuangan akan memadai bersamaan peraturan pemerintah yang tercantum. Hal ini terjadi karena banyaknya tuntutan masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas publik sebagai suatu media pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan yang dilakukan secara periodik. Tuntutan dilaksanakan akuntabilitas publik mewajibkan pemerintah memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah supaya informasi yang dihasilkan andal (Sukma et al., 2023). Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah ditentukan pada peraturan pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang informasi pelaporan keuangan andal dan laporan keuangan tersebut bisa dipakai sebagai pemberian

keputusan dalam mengalokasikan dana. Pelaporan keuangan dapat dikatakan andal apabila dalam penyajiannya terdapat fakta-fakta secara benar dan relevan dan bisa diverifikasi serta diproses guna menentukan kebenaran penyampaian laporan keuangan. Jika dalam penyajian laporan keuangan tidak bisa dipercaya maka Penggunaan informasi laporan keuangan tidak bisa mempercayai informasi yang telah disajikan.

BPK telah melakukan pemeriksaan sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.1 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023

Kasus		Jumlah Kasus	Presentase
A	Kelemahan sistem pengendalian internal	7.006	44,6%
B	Ketidakpatuhan	8.626	55,0%
	a. Penyimpangan administrasi	2.538	29,4%
	b. Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan	6.088	70,6%
C	Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	57	0,4%
	a. Ketidakhematan	7	12,3%
	b. Ketidakefektifan	50	87,7%

(Sumber: IHPS 1 BPK Tahun 2023)

Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2023 menemukan 9.261 temuan dengan 15.689 permasalahan senilai Rp18,19 triliun. Temuan ini meliputi kelemahan SPI sebanyak 7.006 kasus (44,6%), ketidakpatuhan senilai Rp16,92 triliun dari 8.626 kasus (55,0%), dan ketidakhematan, ketidakefisienan, serta ketidakefektifan senilai Rp1,27 triliun dari 57 kasus (0,4%). Dari 8.626 kasus ketidakpatuhan, sebanyak 6.088 kasus (70,6%) senilai Rp16,92 triliun menyebabkan kerugian Rp3,48 triliun (4.100 kasus), potensi kerugian Rp7,43 triliun (775 kasus), dan kekurangan penerimaan Rp6,01 triliun (1.213 kasus).

Permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi mencapai 2.538 kasus (29,4%) dari total 57 masalah ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,27 triliun. Sebanyak 7 kasus (12,3%) terkait ketidakhematan senilai Rp222,29 miliar, sedangkan 50 kasus (87,7%) terkait ketidakefisienan senilai Rp1,05 triliun. Ketidakpatuhan terhadap temuan BPK menunjukkan kelemahan pengelolaan keuangan daerah, yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, ekonomis, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengaturan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu melaporkan laporan tanggung jawab. Pemerintah pusat akan memberikan sumber daya keuangannya dengan semua daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dimana sudah dicantumkan pada UU No. 23 Tahun 2014. Adanya kewenangan tersebut tidak berguna bagi pemerintah daerah bisa memakai sumber daya keuangan yang ada tidak terarah. Hak serta kewenangan dialokasikan pada pemerintah daerah serta dasarnya adalah wajib tanggung jawab dengan transparan serta akuntabel, pada Pemerintah Pusat ataupun masyarakat (Syahdi & Bijaang, 2019).

Pengoperasian sistem informasi memerlukan peran manusia, sehingga kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem akuntansi menjadi kunci untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kemampuan sumber daya manusia yang andal sangat diperlukan untuk menyusun dan menyempurnakan laporan keuangan tepat waktu. Kompetensi sumber daya manusia, yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik profesional, berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, semakin baik kualitas pengelolaan dan laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah.

Kegagalan penangkapan serta pelaksanaan oleh sumber daya manusia dapat mempengaruhi laporan keuangan, contohnya terdapat kesalahan pada laporan yang belum memenuhi standar dari pemerintah, maka laporan keuangan itu tidak andal. Penyebab lain yang bisa berpengaruh terhadap kemampuan

pengaturan keuangan daerah ialah pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan temuan BPK RI (BPK RI, 2023) mengatakan jika faktor lemahnya bantuan sistem informasi dapat berpengaruh terhadap kasus-kasus ketidaktaatan pada saat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BPK telah melakukan audit terhadap LKPD Provinsi Jambi dengan opini, yaitu:

Tabel 1.2 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi

Tahun Anggaran	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Opini	TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

(Sumber: www.bpk.go.id)

Pemerintah provinsi jambi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) dalam 5 tahun terakhir dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Gubernur Provinsi Jambi yaitu Al Haris dalam wawancaranya mengaku belum puas atas opini WTP yang diberikan, karena masih banyak ditemukan beberapa persoalan atau temuan di laporan keuangan daerah di beberapa OPD Pemprov Jambi.

Gubernur Jambi menyatakan bahwa “Walaupun adanya opini WTP ini jujur saja saya belum puas diri dengan hasil bahwa memang kita WTP tetapi saya tahu bahwa di dalamnya masih ada tidak puas dengan apa yang saya pimpin sehingga masih banyak yang lemah-lemah di mata BPK RI, dan akan melakukan evaluasi bagi OPD yang lemah sebab masih banyak jadi temuan BPK.”(Detik.com, 2023).

Evaluasi atas temuan tersebut Gubernur provinsi Jambi akan terus melakukan evaluasi bagi OPD yang lemah, sebab masih banyak temuan BPK. Dan Auditor Utama Keuangan Negeri 5 BPK RI yaitu Slamet Kurniawan mengatakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan ini bertujuan memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Penelitian terdahulu telah menguji kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diteliti oleh sebagian peneliti. Julita (2018) telah mengkonfirmasi bahwa sistem pengendalian internal yang efektif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Agung (2019) dan Tiurmaida (2018) menemukan dimana pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Wuriasih (2018) menyebutkan tentang pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh pada kualitas pemerintah daerah laporan keuangan.

Terdapat sebagian penelitian tersebut menyatakan adanya faktor-faktor. Faktor tersebut antara lain adalah sistem pengendalian internal yang berpengaruh positif signifikan pada laporan keuangan (Ulisanti dan Asrori, 2021). Tingkat ketidakpastian yang dihadapi sektor publik di masa depan semakin meningkat, maka tidak terlepas pada perkembangan teknologi informasi yang menyebar di semua sektor termasuk sektor publik (Mardiasmo, 2018). Zubaidi, N., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019) menyatakan tentang pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan pada keandalan serta ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan daerah sebelumnya dilakukan Zubaidi et al. (2019); Shohabatussa'adah dan Nasrullah (2021); Sundari dan Sri Rahayu (2019). Penelitian Zubaidi et al., (2019) mengatakan tentang kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan di Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo dan Biro Layanan Informasi dan Komunikasi. Sementara itu, penelitian Shohabatussa'adah dan Nasrullah (2021) membuktikan secara parsial kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Sundari dan Sri Rahayu (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Peneliti menduga kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi pada laporan keuangan. Alasannya karena jika sumber daya manusia memiliki kompetensi yang baik maka dalam penerapan pada suatu pengendalian intern dan pemanfaatan teknologinya yang baik dan akurat maka akan bisa meningkatkan mutu laporan keuangan. Sumber daya manusia bukan sebatas dapat diketahui dari kemampuan yang ada, tetapi bisa menilai pertanggungjawaban yang ada pada Sumber daya itu sendiri. Sumber daya manusia yang berkualitas bisa menciptakan kualitas laporan keuangan dengan sesuai (Agung, T. M dan G. 2018). Sependapat dengan Indriyani dan Widiastuti (2020) yang menyatakan tentang kompetensi sumber daya manusia dapat memperkuat hubungan sistem intern pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini adalah replikasi penelitian sebelumnya yang dijalankan Zubaidi., et al (2019) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi dimana terdapat hasil yang beragam pada penelitian terdahulu. Kegagalan pemahaman serta penerapan pada sumber daya manusia bisa memberikan pengaruh buruk pada laporan keuangan, contohnya terdapat kesalahan laporan karena belum memenuhi standar dari pemerintah, maka laporan keuangan bisa berkualitas rendah. Terdapat faktor lainnya bisa mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah ialah pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan penemuan BPK RI (BPK RI, 2020) mengatakan jika faktor lemahnya bantuan sistem informasi dapat berpengaruh pada adanya kasus-kasus ketidaktaatan pada penyusunan LKPD. Informasi adalah produk dari sistem teknologi informasi berfungsi sebagai penyedia informasi dimana berguna bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk pada saat pelaporan keuangan, hingga mendukung proses pengambilan keputusan serta pelaporan agar lebih efektif. Variabel pemanfaatan teknologi informasi dipakai sebagai variabel perantara yang menghubungkan pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan daerah, dikarenakan pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia yang ada. Selain itu

pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh pada pengaturan keuangan terutama di pembuatan laporan keuangan daerah.

Terdapat beberapa pembeda penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Zubaidi., et al (2019). Penelitian ini, peneliti menambah variabel sistem pengendalian internal dan menambah variabel moderasi karena topik yang diambil telah digunakan beberapa peneliti terdahulu. Selain itu variabel moderasi yang dipakai adalah kompetensi Sumber Daya Manusia serta Variabel Y yang digunakan peneliti adalah Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian lebih dalam tentang **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada OPD di Provinsi Jambi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti membuat rumusan masalah penelitian ini yakni:

1. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi?
4. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi?
5. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dapat dimuat tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi
4. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yakni sebagai berikut:

1. Teoritis: Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam perkembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi yang khususnya berkaitan dengan pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Praktis: Sebagai bahan informasi pelengkap atau sebagai masukan sekaligus pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan Sistem pengendalian internal pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan
3. Peneliti selanjutnya: Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia daripada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.